

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor kelapa sawit adalah komoditas strategis yang memiliki peran krusial dalam perekonomian negara dengan memberikan kontribusi terhadap devisa, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan sektor pertanian. Menurut GAPKI (2023), industri ini menjadi pilar utama perekonomian sekaligus penggerak ekonomi wilayah pedesaan. Pemerintah memperkuat kebijakan hilirisasi melalui pemanfaatan minyak sawit mentah (CPO) untuk biodiesel, seperti implementasi program B35 yang mencerminkan upaya menyinergikan tujuan ekonomi dan ketahanan energi nasional (Kementrian ESDM, 2023).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), luas area perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 14.936.841 hektar dengan total produksi sekitar 41.849.316 ton *crude palm oil* (CPO) setiap tahunnya, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia. Besarnya luas lahan dan tingginya tingkat produksi tersebut menunjukkan bahwa komoditas kelapa sawit memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional, baik sebagai sumber devisa melalui kegiatan ekspor maupun sebagai sektor yang menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Permintaan yang tinggi di pasar internasional juga mendorong perkembangan sektor perkebunan kelapa sawit setiap tahunnya. Menurut data dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi yang memberikan kontribusi besar terhadap produksi kelapa sawit nasional, bahkan menduduki peringkat keempat sebagai provinsi sentra kelapa sawit di Indonesia

dengan luas lahan perkebunan mencapai 1.829.533 hektar dan total produksi sebesar 5.200.745 ton sepanjang tahun 2022. Situasi ini mengindikasikan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan warga sekitar, serta mendukung pembangunan wilayah, khususnya di wilayah yang mayoritas penduduknya bergantung pada subsektor perkebunan kelapa sawit.

Tabel 1.1. Sepuluh Provinsi dengan Produksi Kelapa Sawit Tertinggi di Indonesia pada Tahun 2023.

No	Provinsi	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Riau	3.494.583	9.222.465
2.	Kalimantan Tengah	2.037.705	8.466.673
3.	Sumatra Utara	2.018.727	5.006.543
4.	Kalimantan Barat	1.829.533	5.200.745
5.	Sumatra Selatan	1.407.544	4.130.197
6.	Kalimantan Timur	1.321.692	3.853.054
7.	Jambi	1.190.813	2.214.159
8.	Sumatra Barat	555.076	1.369.851
9.	Kalimantan Selatan	516.033	1.329.100
10.	Aceh	565.135	1.056.529
Total		14.936.841	41.849.316

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2024).

Tabel 1.1 menunjukkan sepuluh provinsi dengan luas lahan dan produksi kelapa sawit tertinggi di Indonesia pada tahun 2023 berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan (2024). Secara umum, terlihat bahwa Riau menduduki posisi pertama dengan luas lahan sebesar 3,49 juta hektar dengan produksi mencapai 9,22 juta ton, menjadikannya pusat produksi sawit terbesar di Indonesia. Kalimantan Tengah dan Sumatra Utara berada di peringkat berikutnya, masing-masing dengan jumlah produksi 8,46 juta ton dan 5 juta ton.

Meskipun Kalimantan Barat berada di peringkat keempat, kontribusinya tetap sangat signifikan. Provinsi ini memiliki luas lahan sebesar 1,829 juta hektar serta produksi 5,2 juta ton, menjadikannya salah satu provinsi strategis dalam

pembangunan industri sawit nasional. Keberadaan Kalimantan Barat dalam jajaran empat besar menunjukkan bahwa provinsi ini memainkan peran penting dalam menopang total produksi nasional mencapai 41,8 juta ton. Posisi Kalimantan Barat tidak menempati peringkat pertama, namun tetap masuk kelompok teratas, mengindikasikan bahwa provinsi ini memiliki potensi besar untuk terus berkembang. dengan peningkatan produktivitas dan penguatan kapasitas petani rakyat, Kalimantan Barat sangat berpeluang memperkuat posisinya dalam struktur industri sawit nasional, mengingat karakteristik agroklimatnya yang mendukung dan luasnya area perkebunan yang terus berkembang.

Meskipun demikian, produktivitas kelapa sawit masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan data BPS (2023) di Kalimantan Barat, produktivitas kelapa sawit dari perkebunan rakyat hanya sebesar 1.172,8 ribu ton, kesenjangan ini sangat signifikan jika dibandingkan dengan produksi oleh perkebunan swasta sebesar 5.437,40 (BPS 2024). Perkebunan rakyat yang menguasai lebih dari 30% luas lahan justru menunjukkan produktivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan perkebunan besar milik swasta. Kondisi ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor internal, seperti umur tanaman yang tergolong tua, kualitas bibit yang kurang unggul, rendahnya kompetensi tenaga kerja, dan keterbatasan manajemen usaha, serta faktor eksternal, seperti keterbatasan akses untuk modal, infrastruktur yang belum memadai, fluktuasi harga pupuk dan TBS, serta kebijakan yang tidak jelas.

Kalimantan Barat memberikan kontribusi signifikan terhadap total produksi nasional. Hal tersebut dibuktikan oleh data dari Direktorat Jenderal Perkebunan dan BPS Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa adanya peningkatan areal dan produksi dalam lima tahun terakhir (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023; BPS

Provinsi Kalimantan Barat, 2024). Karakteristik agroklimat dan pola kepemilikan lahan juga turut mempengaruhi perbedaan produktivitas antar wilayah dalam provinsi ini.

Tabel 1.2. Produksi Kelapa Sawit Seluruh Kabupaten di Kalimantan Barat 2023

Kabupaten/Kota	Produksi Kelapa Sawit 2023 (Ton)
Ketapang	560.225
Sanggau	390.383
Landak	75.809
Sekadau	70.081
Sintang	46.100
Melawi	35.582
Kubu Raya	35.134
Sambas	24.863
Bengkayang	12.655
Mempawah	8.734
Kota Singkawang	5.769
Kayong Utara	5.189
Kapuas Hulu	866
Pontianak	-
Total	1.271.389

Sumber: BPS Kalimantan Barat, 2023.

Tabel 1.2 memberikan gambaran mengenai produksi kelapa sawit Kalimantan Barat tahun 2023 dimana menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup besar antarwilayah dalam kontribusinya terhadap total produksi provinsi. Kabupaten Ketapang tercatat sebagai penghasil terbesar dengan produksi 560.225 ton, disusul Sanggau dengan 390.383 ton, sehingga kedua daerah ini menjadi pusat utama industri sawit di provinsi tersebut. Kabupaten lain seperti Landak, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kubu Raya berada pada kategori menengah dengan produksi berkisar 30–75 ribu ton, mencerminkan keberadaan perkebunan rakyat dan perusahaan swasta skala menengah. Sementara itu, wilayah seperti Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kayong Utara, dan Singkawang memiliki produksi jauh lebih kecil, bahkan Kapuas Hulu hanya mencatat 866 ton, menunjukkan minimnya aktivitas perkebunan sawit skala besar. Menariknya, Kota Pontianak tidak memiliki

produksi kelapa sawit sama sekali karena wilayah ini merupakan kota metropolitan dan pusat pemerintahan dengan area yang didominasi permukiman, layanan publik, perdagangan, dan jasa, sehingga tidak tersedia lahan untuk perkebunan sawit.

Kabupaten Ketapang merupakan satu dari 14 kabupaten di Kalimantan Barat yang berkontribusi cukup besar terhadap produksi sawit di tingkat provinsi dan paling banyak se-provinsi. Pola kepemilikan lahan di kabupaten Ketapang memperlihatkan kombinasi antara perkebunan besar swasta, negara, dan perkebunan rakyat. Kesenjangan produktivitas antar tipe kepemilikan ini menimbulkan kebutuhan akan intervensi yang spesifik untuk meningkatkan kapasitas SDM dan modal di tingkat petani kecil (BPS Kabupaten Ketapang, 2024).

Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, merupakan salah satu pusat produksi kelapa sawit yang mencerminkan kondisi perkebunan rakyat di Kalimantan Barat. Berdasarkan unggahan data BPS Kabupaten Ketapang (2024), terdapat sekitar rumah tangga pemilik kebun di wilayah ini dengan rata-rata luas lahan sebesar 3,2 hektar per kartu keluarga. Komposisi lahan menunjukkan kontribusi perkebunan rakyat, sementara perkebunan besar swasta (PBS) juga berpengaruh pada harga, akses pasar dan input di tingkat perkebunan rakyat.

Tabel 1. 3. Kategori Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Manis Mata 2025.

Kategori	Luas (Ha)
Belum Menghasilkan	6.969
Menghasilkan	56.709
Tua/Rusak	4,00
Jumlah Luas	63.682

Sumber: BPS Kabupaten Ketapang dalam Angka 2025.

Tabel 1.3 menyajikan kondisi perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Manis Mata yang menunjukkan dominasi kategori kebun telah menghasilkan. Dari total luas areal sebesar 63.682 hektar, sekitar 56.709 hektar berada pada kategori

menghasilkan, sementara 6.969 hektar tergolong belum menghasilkan dan hanya 4 hektar berada pada kondisi tua atau rusak. Selain itu, jumlah petani kelapa sawit tercatat sebanyak 5.005 kepala keluarga (KK). Namun demikian, data jumlah petani tersebut disajikan secara agregat tanpa pemisahan menurut kategori tanaman menghasilkan, belum menghasilkan, maupun tua atau rusak, sehingga pengelompokan berdasarkan kategori tersebut hanya tersedia untuk luas areal tanaman.

Tabel 1.4. Kontribusi Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Manis Mata 2025.

Indikator	Jumlah
Jumlah KK Pemilik Kebun (KK)	5.005
Rata-rata Luas Lahan per KK (Ha)	3.2
Perkebunan Besar Swasta (Ha)	1.497,187
Perkebunan Besar Swasta (Ton)	6.386,002
Perkebunan Rakyat (Ha)	666.700
Perkebunan Rakyat (Ton)	1.172,8
Selisih Produksi PBS vs PR	2,50 ton/ha

Sumber: BPS Kabupaten Ketapang: Kecamatan Manis Mata dalam Angka 2024, dan BPS Kabupaten Ketapang dalam Angka 2025.

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit adalah industri yang sangat penting dalam struktur ekonomi Kecamatan Manis Mata. Jumlah kepala keluarga (KK) pemilik kebun sawit tercatat sebanyak 5.005 KK pada tahun 2025 dengan rata-rata luas lahan yang dikelola sekitar 3,2 hektar per KK, yang menunjukkan dominasi usaha perkebunan rakyat berskala kecil. Dari sisi penguasaan dan kinerja produksi, perkebunan besar swasta mengelola lahan seluas 1.497.187 hektar dengan total produksi sebesar 6.386.002 ton, sementara perkebunan rakyat mengelola lahan seluas 666.700 hektar dengan produksi sebesar 1.172,8 ton. Perbedaan tersebut menghasilkan selisih produktivitas antara perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat sebesar 2,50 ton per hektar, yang mengindikasikan adanya kesenjangan dalam skala usaha, efisiensi pengelolaan, dan kemampuan produksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun perkebunan

rakyat melibatkan lebih banyak rumah tangga, perkebunan besar swasta masih memiliki keunggulan dalam penguasaan lahan dan produktivitas, yang berdampak pada perbedaan kontribusi ekonomi dan tingkat kesejahteraan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayah Kecamatan Manis Mata.

Salah satu penyebab ketimpangan yang terjadi dikarenakan adanya masalah pada faktor internal pada petani di kecamatan Manis Mata, petani masih dihadapkan pada keterbatasan keterampilan teknis dan kapasitas sumber daya manusia, yang terlihat dari praktik budidaya dan pemeliharaan kebun yang belum sepenuhnya mengikuti standar teknis yang dianjurkan, seperti pemupukan yang tidak berimbang, teknik panen yang kurang tepat, serta pengelolaan kebun yang masih bersifat tradisional (Tropenbos Indonesia, 2020). Kondisi ini diperkuat oleh kajian nasional yang mengungkapkan bahwa petani kelapa sawit skala kecil di Indonesia umumnya menghadapi keterbatasan dalam mendapatkan modal, teknologi, dan layanan penyuluhan, yang menghambat kemampuan mereka untuk mengadopsi praktik budidaya yang lebih efisien dan berkelanjutan (Daemeter, 2025). Selain itu, keterbatasan keterampilan dan kapasitas petani juga menjadi salah satu faktor utama yang diidentifikasi dalam berbagai kajian terkait program peremajaan dan peningkatan produktivitas sawit rakyat, sehingga pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit menekankan pentingnya pelatihan, pendampingan teknis, dan penguatan kelembagaan petani sebagai bagian dari kebijakan pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat (BPDPKS, 2018).

Tentunya ketimpangan tersebut tidak luput dari adanya faktor eksternal yang terjadi seperti fluktuasi harga tandan buah segar (TBS), keterbatasan akses terhadap input produksi, kualitas infrastruktur, serta arah kebijakan publik di sektor kelapa

sawit. Penetapan harga TBS yang diterima petani sangat bergantung pada mekanisme penetapan harga pemerintah daerah dan kualitas TBS yang dihasilkan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian mengenai panduan untuk menentukan harga beli TBS kelapa sawit hasil pertanian petani, yang menegaskan bahwa mutu buah menjadi faktor utama dalam pembentukan harga di tingkat petani (Kementerian Pertanian, 2018). Selain harga, keterbatasan akses terhadap pupuk, benih unggul, pembiayaan formal, dan infrastruktur jalan turut memengaruhi kemampuan petani untuk melakukan perawatan kebun secara optimal dan berinvestasi dalam peningkatan produktivitas, sehingga kebun rakyat cenderung dikelola dengan apa adanya (Daemeter, 2025). Dari sisi kebijakan publik, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dirancang untuk mengatasi masalah produktivitas kebun tua dan tidak produktif, namun implementasinya masih menghadapi tantangan administratif dan kesiapan petani, terutama terkait akses pendanaan, legalitas lahan, dan kapasitas kelembagaan petani (BPDPKS, 2018). Pada sisi hilir, kebijakan biodiesel B35 yang diterapkan pemerintah meningkatkan permintaan CPO nasional dan berdampak pada dinamika harga sawit, namun manfaat kebijakan ini tidak selalu dirasakan secara langsung oleh petani kecil karena lemahnya posisi tawar di tingkat pemasaran (Kementerian ESDM, 2023). Selain itu, hubungan petani dengan pedagang pengepul turut memengaruhi harga TBS yang diterima, karena pengepul menerapkan standar mutu yang ketat sesuai dengan persyaratan pabrik kelapa sawit, sehingga praktik panen yang tidak sesuai standar seperti pemanenan buah mentah, tingginya kotoran, atau tingkat kematangan yang tidak optimal dapat menyebabkan penurunan kualitas

TBS dan berdampak pada penurunan harga beli untuk menghindari risiko penolakan atau penalti dari pabrik (Pusat Penelitian Kelapa Sawit, 2016).

Purba, (2017) menyatakan bahwa dalam penyusunan strategi perkebunan sawit, faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan usaha tani seperti produktivitas, kualitas bibit, dan efisiensi biaya; sedangkan faktor eksternal mencakup peluang dan ancaman seperti harga pasar, kebijakan pemerintah, keberadaan tengkulak, hingga perubahan iklim. Pada penelitian ini, faktor internal mencakup pendidikan, pengalaman, dan pelatihan yang dimiliki petani, yang menentukan kemampuan mereka dalam menerapkan praktik budidaya yang benar. Sementara itu, faktor eksternal meliputi akses terhadap pelatihan, dukungan kebijakan pemerintah, serta fasilitas penunjang lainnya. Pada kelompok teknis agronomi, faktor internal terdiri dari umur tanaman, kualitas bibit, serta teknik panen yang digunakan petani, sedangkan faktor eksternal mencakup ketersediaan pupuk dan layanan teknis yang dapat membantu meningkatkan produktivitas kebun. Terakhir, pada kelompok akses dan pasar faktor internal ditarik dari kemampuan petani dalam mengelola panen, sementara faktor eksternal seperti harga TBS, kondisi infrastruktur, dan akses ke pabrik turut menentukan keuntungan dari kelancaran pemasaran hasil panen. Secara keseluruhan, tabel ini menegaskan bahwa peningkatan produktivitas tidak hanya bergantung pada kapasitas petani itu sendiri, tetapi juga pada lingkungan eksternal yang mendukung, termasuk akses informasi, sarana produksi, dan juga fluktuasi harga di pasar.

Peningkatan produktivitas pada tiap hektar lahan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan usaha tani sehingga menaikkan kesejahteraan rumah tangga. Indikator kesejahteraan yang akan dipakai yakni dihitung melalui nilai tukar

petani, yang mana penerimaan dari hasil panen dikurangi dengan pengeluaran rumah tangga dari setiap periode panennya.

Analisis kesejahteraan pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan survei rumah tangga, yang dilengkapi wawancara kualitatif untuk menangkap apakah hasil dari penerimaan produksi lahan mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga pada setiap periode panennya. dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai perubahan produktivitas, tetapi juga dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan sosial rumah tangga di tingkat petani.

Tabel 1.5. Indikator Kesejahteraan Penelitian.

Indikator Kesejahteraan	Definisi	Unit
Pendapatan Bersih Usaha	Pendapatan usaha setelah biaya	IDR/KK/bulan
Pengeluaran Konsumsi	Total konsumsi rumah tangga	IDR/KK/bulan
Kepemilikan Aset Produktif	Jumlah aset pertanian produktif	Unit/KK

Tabel 1.5 yaitu indikator kesejahteraan menjelaskan tiga komponen utama yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan petani pemilik kebun sawit. Indikator pertama adalah pendapatan bersih usaha, yaitu pendapatan yang diperoleh petani setelah dikurangi seluruh biaya operasional kebun, indikator ini diukur dalam satuan rupiah per kepala keluarga per bulan dan diperoleh melalui survei. Indikator kedua adalah pengeluaran konsumsi, yang menunjukkan total belanja rumah tangga petani per bulan, sehingga dapat menunjukkan kemampuan ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Indikator ketiga adalah kepemilikan aset produktif, yaitu jumlah aset pertanian yang dimiliki petani seperti alat kerja, mesin sederhana, atau sarana produksi lain yang dinyatakan dalam unit per kepala keluarga. Ketiga indikator tersebut secara bersama-sama memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi kesejahteraan petani, baik dari sisi pendapatan, pola konsumsi, maupun kapasitas aset yang mendukung keberlanjutan usaha tani mereka.

Berbagai penelitian dan publikasi statistik telah mengkaji pengembangan perkebunan kelapa sawit dari sisi produksi dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Namun, kajian yang secara khusus menggambarkan kondisi petani pemilik kebun kelapa sawit rakyat pada tingkat kecamatan masih relatif terbatas, terutama yang mengaitkan aspek keterampilan pengelolaan kebun, pengaruh faktor internal dan eksternal, serta hubungannya terhadap tingkat kesejahteraan petani. Ketersediaan data sekunder yang umumnya disajikan secara agregat juga belum mampu menggambarkan kondisi nyata petani pada level mikro. Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterbatasan informasi yang menyeluruh mengenai kesejahteraan dan permasalahan yang dihadapi petani pemilik kebun kelapa sawit rakyat di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu mengisi kekosongan kajian tersebut melalui pendekatan deskriptif dan strategis di Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang.

Pemilihan Kecamatan Manis Mata sebagai lokasi penelitian didasarkan pada fenomena menarik terkait kesejahteraan petani pemilik kebun sawit yang berbeda dengan stigma yang berkembang di masyarakat. Selama ini, pemilik kebun sawit sering dianggap sebagai kelompok yang sudah pasti sejahtera secara finansial karena memiliki aset produktif dan menghasilkan pendapatan rutin dari panen Tandan Buah Segar (TBS). Namun, kondisi nyata di lokasi penelitian menunjukkan situasi yang berbanding terbalik. Berdasarkan pengamatan awal dan data sosial ekonomi wilayah, banyak pemilik kebun sawit rakyat di Manis Mata yang masih berada pada kondisi kesejahteraan rendah akibat keterbatasan pendapatan, tingginya biaya operasional kebun, fluktuasi harga TBS, serta lemahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola lahan secara produktif. Fenomena

ini menjadi menarik untuk diteliti karena menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi umum dan kondisi nyata di lapangan, dimana kepemilikan kebun sawit tidak otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan petani sawit rakyat, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika sosial ekonomi masyarakat perkebunan sawit di tingkat lokal.

Berdasarkan berbagai kondisi dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, baik yang bersumber dari faktor internal maupun faktor eksternal, diperlukan suatu kajian yang mampu menjelaskan secara komprehensif kondisi nyata petani pemilik kebun kelapa sawit di tingkat lokal. Meskipun perkebunan kelapa sawit merupakan sektor dominan dan melibatkan ribuan kepala keluarga di Kecamatan Manis Mata, hingga saat ini informasi yang tersedia masih bersifat agregat dan belum mampu menggambarkan secara rinci keterampilan pengelolaan kebun, pengaruh faktor eksternal, serta implikasinya terhadap produktivitas dan kesejahteraan petani sawit rakyat. Kesenjangan produktivitas antara perkebunan rakyat dan perkebunan besar swasta, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta pengaruh fluktuasi harga, akses input, dan kebijakan publik menunjukkan bahwa kepemilikan kebun sawit tidak secara otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani. Apabila kondisi ini tidak dikaji secara mendalam, maka perumusan kebijakan dan strategi pengembangan perkebunan kelapa sawit berpotensi tidak tepat sasaran dan kurang menyentuh permasalahan mendasar yang dihadapi petani rakyat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji strategi pengembangan sumber daya manusia dalam

meningkatkan kesejahteraan pemilik kebun kelapa sawit rakyat di Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang, sehingga dapat memberikan gambaran yang nyata tentang keadaan dan kebutuhan petani untuk mengelola kebun kelapa sawit dengan cara yang lebih lebih produktif dan berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks dan pentingnya penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka isu yang dianalisis dalam studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesejahteraan petani pemilik kebun sawit?
2. Apa saja faktor internal dan faktor eksternal yang memengaruhi kesejahteraan pemilik kebun kelapa sawit?
3. Bagaimana strategi peningkatan kesejahteraan pemilik kebun?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghitung tingkat kesejahteraan petani pemilik kebun kelapa sawit.
2. Mengidentifikasi karakteristik faktor internal dan eksternal dalam meningkatkan kesejahteraan pemilik kebun.
3. Menganalisis strategi untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik kebun kelapa sawit.

1.4. Manfaat

Penelitian diharapkan memberikan keuntungan bagi orang yang membaca atau yang terlibat di dalamnya. Maka, manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan di bidang agribisnis, khususnya terakut hubungan antara kualitas sumber daya manusia (SDM) dan produktivitas usahatani kelapa sawit. Temuan empiris dari tingkat kecamatan juga memberikan bukti lokal yang relevan untuk mengisi kekosongan penelitian terdahulu yang jarang menekankan analisis berbasis lokal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Petani Lokal

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat praktis berupa informasi mengenai kondisi internal usaha tani yang perlu diperkuat, serta gambaran tingkat kesejahteraan petani pemilik kebun kelapa sawit. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kondisi ekonomi rumah tangga dan dasar dalam pengambilan keputusan pengelolaan usaha tani yang lebih tepat.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat dalam memperluas wawasan dan pemahaman mengenai keterkaitan antara kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, dan kesejahteraan petani kelapa sawit, sekaligus meningkatkan kemampuan dalam menerapkan teori agribisnis, manajemen sumber daya manusia, dan ekonomi pertanian ke dalam konteks nyata sebagai bekal profesional di bidang pertanian dan perkebunan.